

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Good Corporate Governance

Good Corporate Governance adalah suatu istilah yang sudah tidak asing lagi di Negara Indonesia. Mula terjadinya krisis ekonomi di Indonesia karena pada tahun 1998 sebagian perusahaan yang terdapat di Negara Indonesia belum menerapkan Good Corporate Governance pada operasionalnyapun masih dirasa merugi karena Good Corporate Governance yang ada didalam perusahaan masih lemah (Rofina dan Maswar,2013). Selain karena lemahnya penerapan Good Corporate Governance atau kata lainnya yaitu lemahnya pada prinsip-prinsipnya yang membuat perusahaan merasa merugi tetapi juga karena adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di Indonesia, misal saja seperti minimnya peraturan akan batasan antara hak dan kewajiban pihak yang terkait dengan kinerja perusahaan, serta tercemin dari kurang tersedianya informasi untuk melakukan analisis, adanya investasi berlebihan, kurang atau menurunnya produktivitas perusahaan (Triyadi dan Dharma, 2016).

Buku yang ditulis oleh Muh Arief Effendy (2000) berjudul *The Power Of Good Corporate Governance* yang mendefinisikan mengenai Good Corporate Governance dari seorang peneliti yaitu Tumbull Report di Inggris, bahwasanya Good Corporate Governance adalah :

“sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang”

Sedangkan Good Corporate Governance menurut bank Dunia adalah

“sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib di penuhi, yang dapat mendorong kinerja dari sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka

panjang yang berkesinambung bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.”

2.1.1.1 Tujuan Good Corporate Governance

Tujuan Corporate Governance menurut kementerian BUMN sesuai pasal 4 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada BUMN yang ditulis oleh Muh Arief Effendy (2000), bertujuan untuk:

1. Perusahaan yang menerapkan Good Corporate Governance didalamnya harus mampu untuk mempertahankan perusahaan baik secara nasional maupun internasional dengan memaksimalkan pada peraturan serta nilai-nilai yang sesuai ketentuan dari BUMN.
2. Good Corporate yang menggunakan nilai-nilai BUMN akan meningkatkan kemandirian Persero/Organ yang memiliki tujuan agar Persero/Organ tidak saling ketergantungan dan tidak mudah untuk dipengaruhi baik dari dalam maupun dari luar perusahaan.
3. Dalam pengambilan suatu keputusan pada suatu perusahaan maka organ Persero/Organ Perum harus menggunakan dasar-dasar atau pedoman dari nilai-nilai moral yang memiliki kesadaran atas tanggungjawab sosial BUMN kepada pemangku kepentingan serta menaati dari suatu peraturan perundang-undang itu sendiri.

2.1.1.2 Faktor Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Andira (2012) bahwa syarat keberhasilan penerapan Good Corporate Governance memiliki dua factor yang memegang peranan sebagai berikut:

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dimaksud adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan Good Corporate Governance, di antaranya sebagai berikut:

- a. Terdapatnya sistem hukum yang baik .
- b. Dukungan pelaksanaan Good Corporate Governance dari sektor publik/lembaga pemerintahan.
- c. Terdapatnya contoh pelaksanaan Good Corporate Governance yang tepat (*best practice*).
- d. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat.

2. Faktor Internal

Definisi dari faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek Good Corporate Governance yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

- a. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan Good Corporate Governance dalam mekanisme serta system kerja manajemen di perusahaan.
- b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai Good Corporate Governance.
- c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar Good Corporate Governance.
- d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan.
- e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik

dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

2.1.1.3 Asas-asas Good Corporate Governance

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mengeluarkan pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia yang merupakan pelengkap dan bagian tak terpisahkan dari pedoman umum Good Corporate Governance. Pedoman ini ditujukan khusus perbankan untuk memastikan terciptanya bank dan sistem perbankan yang sehat Menurut Komite Kebijakan Governance (KNKG), Good Corporate Governance adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Corporate governance berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Maka dari itu untuk melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip-prinsip.

Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah menurut Armildar(2012) :

1. Peraturan yang dibuat dan diciptakan oleh negara serta para anggota didalamnya yang tertulis dalam perundang-undangan yang menunjang usaha yang bersifat sehat, efisien dan transparan dalam laporan usaha serta konsistennya dalam penegakan hukum. Adapun peranan negara yang dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:
 - a. Pihak-pihak yang bersangkutan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan harus dapat memahami perkembangan usaha atau bisnis yang terjadi, guna pemahaman tersebut agar menyempurnakan atas peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan sistem hukum nasional dengan

mengutamakan kebijakan yang sama atau sesuai dengan dunia usaha dan masyarakat.

- b. Suatu negara harus memiliki integritas yang kuat serta profesionalitas yang tinggi di dalam sistem politiknya. Hal yang terpenting di dalam sistem politik adalah dengan mengutamakan kerja politik yang sehat.
 - c. Melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten .
 - d. Menghilangkan dan meniadakan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
 - e. Mengatur kewenangan dan koordinasi antar instansi yang jelas untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dengan integritas yang tinggi dan mata rantai yang singkat serta akurat dalam rangka mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan.
 - f. Memberlakukan peraturan perundang-undangan untuk melindungi saksi dan pelapor (whistleblower) yang memberikan informasi mengenai suatu kasus yang terjadi pada perusahaan . pemberi informasi dapat berasal dari manajemen ,karyawan perusahaan atau pihak lain.
 - g. Mengeluarkan peraturan untuk menunjang pelaksanaan good corporate governance dalam bentuk ketentuan yang dapat menciptakan iklim usaha yang sehat , efisien dan transparan.
 - h. Adanya keadilan didalam hak dan kewajiban antara pemegang saham dalam hal Negara dengan pemegang saham perusahaan.
2. Good Corporate Governance yang digunakan atau yang diterapkan didalam perusahaan adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan usaha agar tercapainya tujuan dari perusahaan tersebut. Atau kata lain bahwa penerapan Good Corporate

Governance memiliki pelaku pasar yang dapat disebut sebagai dunia usaha.

Peranan dari dunia usaha dalam hal ini dapat di jelaskan sebagai berikut:

- a. Penerapan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat terwujud iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan.
 - b. Bersikap dan berperilaku yang memperlihatkan kepatuhan dunia usaha dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.
 - c. Mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme(KKN).
 - d. Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja perusahaan yang di dasarkan pada asas good corporate governance secara berkesinambungan.
 - e. Melaksanakan fungsi ombudsman untuk dapat menampung informasi tentang penyimpangan yang terjadi pada perusahaan. Fungsi ombudsman dapat dilaksanakan bersama pada suatu kelompok usaha atau sektor ekonomi tertentu.
 - f. Melaksanakan fungsi ombudsman untuk dapat menampung informasi tentang penyimpangan yang terjadi pada perusahaan. Fungsi ombudsman dapat dilaksanakan bersama pada suatu kelompok usaha atau sektor ekonomi tertentu.
3. Peran masyarakat sangat penting sebagai pengguna hasil produk dan jasa dunia usaha selain itu pihak-pihak yang terkena dampak dari perusahaan akan senantiasa menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial secara obyektif dan bertanggungjawab. Peranan dari masyarakat dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a. Melakukan kontrol sesuai dengan memberikan perhatian dan kepedulian terhadap pelayanan masyarakat yang dilakukan penyelenggara Negara serta

terhadap kegiatan produk atau jasa yang dihasilkan oleh dunia usaha, melalui penyampaian pendapat secara objektif dan bertanggungjawab.

- b. Melakukan komunikasi dengan penyelenggara negara dan dunia usaha dalam mengekspresikan pendapat dan keberatan masyarakat.

Menurut pendapat dari Muh Arief dalam bukunya *The power of Good Corporate Governance* yang mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip dari Good Corporate Governance adalah :

1. Prinsip Transparansi

Kata transparan memiliki arti yaitu terbuka, maka Prinsip Transparansi adalah segala informasi yang ada didalam perusahaan diwajibkan terbuka, tepat waktu, jelas untuk segala informasi dan dapat di perbandingkan baik menyangkut keadaan keuangan perusahaan, pengelolaan perusahaan, kepemilikan perusahaan serta kinerja operasional dari perusahaan itu sendiri. Prinsip transparansi yaitu sebagai berikut :

- a. Pengungkapan informasi tidak terbatas pada informasi material tentang :
 - 1) Suatu perusahaan pasti memiliki tujuan masing-masing didalam perusahaannya, maka tujuan tersebut harus didasari pada keuangan dan hasil operasi perusahaan, laporan keuangan yang sudah diaudit adalah sumber informasi yang berguna untuk memonitor kinerja keuangan dan menjadi dasar untuk menilai asset sekuritas. Para manajer dan pengambilan keputusan sering berdiskusi dengan menggunakan bahan dari laporan keuangan. Pengungkapan hal-hal yng berkaitan dengan perusahaan secara akan sangat bermanfaat.
 - 2) Tujuan perusahaan harus disosialisasi kepada lingkungan bisnis dan masyarakat umum.

- 3) Kepemilikan saham mayoritas dan hak-hak suara dengan berhubungan dengan hak-hak mereka sebagai pemilik saham.
 - 4) Anggota dewan komisaris serta penghasilannya. Dasar membutuhkan informasi ini untuk mengevaluasi kinerja dan kualifikasi anggota dewan serta mengukur seberapa besar potensi konflik kepentingan akan memengaruhi keputusan mereka.
 - 5) Adanya kemunculan faktor-faktor risiko, seperti halnya risiko tingkat bunga, ketergantungan atas komoditas tertentu serta tentang risiko yang sekiranya dapat diduga dari informasi yang dapat diperoleh.
 - 6) Struktur dan kebijakan governance perusahaan disini lebih ditekankan pada bagaimana usaha perusahaan dalam mewujudkan Good Corporate Governance.
 - 7) Informasi harus di siapkan, diaudit, dan di ungkapkan sesuai dengan standar kualitas yang tinggi di bidang akuntansi, pengungkapan keuangan dan non keuangan, serta audit.
- b. informasi yang sudah terkumpul kemudian dilaksanakan pemeriksaan tahunan yang dilakukan oleh auditor independen, guna dilakukannya pemeriksaan untuk jaminan keyakinan eksternal yang objektif tentang cara penyiapan dan penyajian laporan keuangan.
 - c. Jalur penyediaan informasi harus mencerminkan keadilan, kecepatan waktu, dan efisien biaya agar informasi yang dihasilkan relevan.

2. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas ini dimaksudkan sebagai prinsip mengatur peran dan tanggungjawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang

kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagai yang diawasi oleh dewan komisaris. Dewan komisaris dalam hal ini memberikan pengawasan terhadap manajemen mengenai kinerja dan pencapaian target yang telah ditetapkan bagi pemegang saham. Supaya prinsip akuntabilitas ini efektif, maka harus dijaga independensinya dari pengaruh manajemen. Pemegang saham yang memiliki kepentingan pengendalian di dalam perseroan harus menyadari tanggung jawab pada soal pemegang saham menggunakan pengaruhnya atas manajemen perseroan, baik dengan menggunakan hak suara mereka atau dengan cara lain. Ada tiga tingkat akuntabilitas, yaitu sebagai berikut :

- a. Akuntabilitas individual, merujuk kepada hubungan akuntabilitas dalam konteks atasan-atasan. Akuntabilitas berlaku kepada kedua belah pihak, baik yang mempunyai wewenang dan yang mendapatkan penugasan dari pemegang wewenang.
- b. Akuntabilitas tim, merujuk kepada adanya akuntabilitas yang di tanggung bersama oleh suatu kelompok kerja atas kondisi dari kinerja yang tercapai
- c. Akuntabilitas korporasi, merujuk kepada akuntabilitas perusahaan dalam menjalankan perannya sebagai entitas bisnis. Dalam hal ini perusahaan bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan.

3. Prinsip Responsibilitas

Prinsip responsibilitas adalah prinsip yang ada didalam perusahaan, dimana perusahaan harus mematuhi dan menuruti peraturan perundang-undang dalam pengelolaan. Selain itu juga, ketentuan korporasi dan perusahaan harus mengupayakan kemitraan dengan semua pemegang kepentingan dengan menerapkan etika bisnis yang sehat.

4. Prinsip Independensi

Perusahaan meyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik tanpa harus tergantung dengan organ lainnya serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Disetiap organ perusahaan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Dalam kegiatan atau dalam operasional perusahaan hanya terdapat organ perusahaan dan tidak boleh ada pihak-pihak yang dapat mencampuri pengurusan perusahaan.

5. Prinsip Kesetaraan

Prinsip kesetaraan adalah pula, sesuai dengan ketentuan berikut :

- a. Pada semua tingkat dari pemegang saham harus memiliki hak suara yang sama. Semua investor harus dapat memperoleh informasi tentang hak suara yang melekat pada semua kelas atau tingkatan saham sebelum mereka membelinya. Setiap perusahaan dalam hak-hak suara harus mendapat persetujuan pemegang saham.
- b. Suara harus disampaikan kepada hominoes atau kustodian. Custodian adalah suatu lembaga yang bertanggungjawab untuk mengamankan aset keuangan dari suatu perusahaan ataupun perorangan. Hominoes atau kustodian disampaikan dengan cara yang disetujui oleh pemegang saham.
- c. Proses dan prosedur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus memungkinkan perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham. Prosedur perusahaan tidak boleh mempersulit atau membutuhkan biaya mahal untuk menyampaikan suara.
- d. Transaksi seseorang yang penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan orang dalam sendiri harus dilarang.

- e. Anggota dewan komisaris dan direksi serta para manajer harus mengungkapkan setiap kepentingan yang bersifat hutang atas transaksi atau hak-hak yang berpengaruh terhadap perusahaan.

Armildar (2012) menyatakan bahwa di dalam prinsip-prinsip Good Corporate Governance terdapat asas-asas yang ditetapkan pada aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas-asas Good Corporate Governance dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Transparansi (Transparency)

Prinsip dasar transparansi, adalah guna untuk mempertahankan perusahaan dalam usaha atau bisnis dengan cara perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dan informasi yang sebenar-benarnya. Informasi harus mudah untuk di akses serta mudah untuk dipahami oleh pemangku kepentingan. Prinsip transparansi mewajibkan perusahaan untuk dapat mengambil keputusan atas pendapat mereka. Pengambilan keputusan tidak hanya dalam pembahasan mengenai permasalahan dari peraturan perundang-undangan tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman pokok pelaksanaan :

- a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah di akses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan hak nya.
- b. Informasi yang harus di ungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan perusahaan lainnya yang memiliki benturan kepentingan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi.
- d. Kebijakan perusahaan tertulis dan secara proporsional di komunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (Accountability)

Prinsip Dasar, perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus di kelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang di perlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Pedoman pokok pelaksanaan :

- a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
- b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan Good Corporate Governance.
- c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system).

- e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah di sepakati.

3. Responsibilitas (Responsibility)

Prinsip dasar, perusahaan harus memenuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Pedoman Pokok Perusahaan :

- a. Seluruh organ yang berada didalam perusahaan diwajibkan memgang teguh pada prinsip kehati-hatian (kewaspadaan) dalam melaksanakan kegiatan atau pengelolaan perusahaan. Selain itu, seluruh organ harus memastikan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan yang telah disepakati bersama didalam perusahaan tersebut.
- b. Perusahaan harus melaksanakan tanggungjawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

5. Independensi (independency)

Prinsip dasar untuk melancarkan pelaksanaan asas good corporate governance, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi (ketergantungan) dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pedoman Pokok Perusahaan:

- a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

- b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.

5. Kesetaraan dan kewajaran (Fairness)

Prinsip Dasar, dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Pedoman Pokok Perusahaan:

- a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik.

Penelitian ini menggunakan indikator berdasarkan pedoman dari Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 yang terdapat pada Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia Perbankan (KNKG, 2004).

- 1) Transparency (keterbukaan) yaitu segala jenis laporan yang ada didalam pengelolaan perusahaan atau bank yang harus memiliki sifat yang terbuka. Baik dalam laporan kinerja perusahaan maupun dalam laporan keuangan disetiap periodenya. Indikator yang diukur adalah :

- a. Waktu penerbitan laporan keuangan
 - b. Visi perusahaan
 - c. Misi perusahaan
 - d. Sasaran perusahaan
 - e. Strategi perusahaan
 - f. Kondisi perusahaan
 - g. Susunan [engurus
 - h. Kompensasi pengurus
 - i. Pemegang saham pengendali
 - j. Pengelola resiko
 - k. sistem pengawas dan pengendalian internal
 - l. Sistem pelaksanaan Good Corporate Governance
 - m. Kejadian penting
 - n. Kepemilikan saham dewan komisaris
- 2) Accountability (Akuntabilitas) yaitu kesanggupan bank dalam mengatur peran dan tugas manajemen dalam mengelola perusahaan serta kemampuan bank dalam menempatkan SDM di masing-masing kemampuan. Indicator yang diukur adalah :
- a. Jumlah anggota komite audit paling kurang 3 dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi
 - b. Reward and punishment system
- 3) Responsibility (Pertanggungjawaban) yaitu dari kedua belak pihak baik pihak nasabah maupun pihak bank diwajibkan memiliki pertanggungjawaban yang telah disepakati terlebih dahulu. Indikator yang diukur adalah :
- a. Mempertimbangkan tanggungjawab social

- b. Memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian
- 4) Fairness (Kesetaraan/Kewajaran), yaitu penyaluran kredit yang dilakukan oleh pihak bank harus berdasarkan pada sikap kesetaraan dan keadilan. Indikator yang diukur adalah :
- a. Keberadaan dewan komisaris independen
- 5) Independency (Kemandirian) yaitu adanya rasa kemandirian tanpa harus ketergantungan dengan organ lain atau faktor lain, karena sifat kemandirian ini harus dimiliki pada pihak perbankan guna dapat mempertahankan perusahaan tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak-pihak luar. Indikator yang diukur adalah:
- a. RUPS minimal 1 (satu) kali dalam periode.

Menjalankan perusahaan adalah hasil-hasil fungsi pekerjaan/kegiatan seorang atau kelompok dalam suatu perusahaan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu.

2.1.2 Kinerja Perusahaan

Perusahaan menurut Bukhori (2012) adalah suatu tempat entitas terjadinya suatu kesatuan dari fungsi dan kinerja operasional yang bekerja secara sistematis dengan memiliki suatu tujuan tertentu. Sedangkan definisi dari kinerja adalah sebagai suatu gambaran dari tingkat hasil atas pelaksanaan dari suatu kegiatan operasional.

Kinerja perusahaan dapat dikatakan sebagai visi, dan misi dari suatu perusahaan serta tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang harus di capai oleh perusahaan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kinerja perusahaan menurut Armildar (2012) adalah hasil dari berbagai pendapat mengenai perusahaan dan sebagai keputusan individual yang di buat secara terus menerus oleh manajemen. Armildar (2012) juga berpendapat bahwa kinerja perusahaan dapat di pengaruhi oleh beberapa faktor, seperti terkonsentrasi atau tidak

terkonsentrasi kepemilikan, melakukan atau adanya manipulasi dalam laba, serta kecurangan yang dilakukan dalam pembukuan atau laporan keuangan.

Kinerja perusahaan dapat dilihat dari berbagai sudut, misal saja melalui berbagai macam indikator atau variabel untuk mengukur keberhasilan atau pencapaian dari suatu perusahaan. Tetapi, kinerja perusahaan pada umumnya lebih diutamakan dalam meneliti informasi-informasi kinerja yang biasanya berasal dari kinerja perusahaan. Banyak manfaat dari penelitian kinerja keuangan, terutama bagi para investor karena dapat membantu dalam penetapan investasi, kreditor dalam pengambilan keputusan kredit, serta dapat membantu dalam menentukan prospek suatu perusahaan dimasa yang akan datang.

Penilaian perusahaan dilakukan untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran perusahaan dan agar dapat mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan oleh perusahaan terlebih dahulu, kemudian penilaian perusahaan keuangan adalah sebagai alat untuk membantu para manajemen dalam pengambilan keputusan, biasanya seorang manajemen dalam pengambilan keputusan dilihat dari laporan keuangan dari laba rugi yang dialami oleh perusahaan, tujuan adanya pengambilan keputusan ini adalah guna melancarkan operasional perusahaan. Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan dua indikator utama untuk pengukuran kinerja keuangan, yaitu dengan menggunakan alat analisis Return On Equity sebagai alat untuk menghitung kinerja perusahaan keuangan (operasional) dan Tobin's Q sebagai alat untuk menghitung kinerja pasar.

2.1.2.1 Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja keuangan dalam perusahaan sangatlah penting bagi perusahaan, pengukuran ini dilakukan oleh perusahaan guna untuk mengetahui apakah suatu perusahaan telah mencapai suatu keberhasilan yang menjadi tujuan keberhasilan dari suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan telah mengalami peningkatan dalam kinerja keuangannya maka perusahaan telah mencapai tujuan. Kinerja seperti halnya sebuah gambaran dari pencapaian

pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan perusahaan yaitu agar dapat memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan.

Menurut Wati (2012) yang mendefinisikan bahwasanya kinerja keuangan perusahaan adalah gambaran mengenai keberhasilan dari perusahaan, yang dilihat apakah perusahaan tersebut memiliki kondisi keuangan yang baik atau buruk. Kondisi keuangan seperti ini menurut penelitian dari Wati (2012) menggunakan suatu analisis keuangan, sehingga dalam waktu atau periode tertentu dapat menghasilkan hasil keuangan dari perusahaan tersebut dalam keadaan baik atau buruk. Jika perusahaan mengalami kondisi keuangan yang buruk, maka tugas seorang manajer untuk mengubah atau mencari kesalahan yang ada hingga membuat kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi yang baik. Seorang peneliti Rofina dan Maswar (2013) memiliki definisi kinerja keuangan yang tidak jauh berbeda dari penelitian Wati (2012). Dimana Rofina dan Maswar (2013) berpendapat bahwa kinerja keuangan selain untuk melihat kondisi keuangan perusahaan tetapi juga sebagai alat untuk mengukur prestasi perusahaan. Alat analisis yang diperlukan oleh sang peneliti adalah beberapa tolak ukur seperti rasio dan indeks, yang menggabungkan dua data keuangan satu sama lain.

Kinerja keuangan sangat erat kaitannya dengan Good Corporate Governance, yang dilihat dari sudut keberhasilan yang di capai dari suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan dapat menjaga Good Corporate Governance perusahaan tidak akan mengalami kinerja keuangan yang buruk dan menjadi perusahaan yang unggul. Maka, penelitian ini menghitung kinerja keuangan dengan menggunakan Return On Equity (ROE).

Return On Equity (ROE) adalah alat untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam mengelola, memanfaatkan, dan menggunakan dana yang berasal dari investasi yang dilakukan oleh investor secara efektif mungkin yang akan menghasilkan net income. Meningkatnya ROE guna untuk memperlihatkan kepada para investor bahwasanya

perusahaan tersebut memiliki adalah perusahaan yang unggul dalam jangka panjang (Maretha dkk, 2013). Return On Equity (ROE) juga merupakan rasio antara net profit terhadap total equity. Yang memiliki penjelasan semakin tinggi Return On Equity (ROE) adalah yang menunjukkan semakin baik atau efisien perusahaan menggunakan modal sendiri guna untuk mendapatkan laba atau keuntungan bersih. Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian perusahaan atau efektivitas perusahaan dengan memanfaatkan ekuitas (shareholders equity) yang dimiliki oleh perusahaan.

2.1.2.2. Kinerja pasar

Perusahaan yang telah menerapkan Good Corporate Governance secara baik pasti akan memiliki kinerja keuangan yang baik dan akan di ikuti oleh kinerja pasar yang tampak pada nilai saham perusahaan sehingga dapat diprediksi bahwa perusahaan yang menerapkan Good Corporate Governance yang lebih baik akan cenderung mempunyai kinerja perusahaan yang baik pula. Kinerja pasar biasanya di ukur dengan menggunakan Tobin's Q. berbagai macam penelitian dibidang ekonomi telah banyak menggunakan Tobin's Q sebagai alat untuk analisis dibidang ekonomi. Semakin tinggi atau meningkatnya rasio Tobin's Q menunjukkan bahwasanya perusahaan memiliki keunggulan yang semakin baik.

Menurut penelitian dari Rossi dan Rosinta (2013) bahwa nilai Tobin's Q adalah harga dari rasio penutup saham pada akhir tahun yang kemudian dikalikan oleh saham yang diperoleh dari yang beredar ditambah nilai buku hutang dibagi dengan total aktiva. Rasio Tobin's Q merupakan alat yang memberikan informasi yang paling memuaskan atau informasi yang paling baik yang dapat menjelaskan dari berbagai fenomena yang dialami atau yang terjadi didalam suatu kegiatan perusahaan. Menurut Tambunan, Saifi, dan Raden (2017) semakin tinggi nilai Tobin's Q semakin tinggi pula perusahaan bahwa perusahaan tersebut menunjukkan pertumbuhan yang baik. Tidak jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya, pendapat dari penelitian Tambunan dkk (2017) juga menyatakan bahwa rasio

Tobin's Q adalah alat yang dapat dikatakan sebagai alat yang akurat, serta alat yang dapat membantu para manajemen dalam mengelola sumber daya yang ada secara efisien mungkin.

Menurut peneliti dari Windah dan Fidelis (2013) bahwa dalam melakukan penelitian mengenai Good Corporate Governance perlunya melibatkan variabel kontrol sebagai pendukung hasil yang di peroleh dari variabel dependen. Didalam penelitiannya tersebut menjelaskan mengenai definisi variabel kontrol adalah variabel yang faktor-faktornya memerlukan pengontrolan. Pengontrolan ini bertujuan untuk mengatasi apabila terdapat gangguan atau adanya indikasi yang dapat mengganggu hubungan antara variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terkait). Perlunya variabel kontrol karena pada variabel kontrol adalah sebagai variabel yang ikut terlibat atau berpengaruh terhadap variabel bebas. Maka, variabel kontrol dapat dikatakan sebagai variabel lain yang dapat mempengaruhi antara variabel independen dengan variabel dependen, berusaha untuk di kontrol atau di netralkan. Dengan demikian, variabel kontrol yang digunakan didalam penelitian ini yaitu Komposisi Aktiva Perusahaan (KAP), Kesempatan Tumbuh (Growth Opportunity) dan Ukuran Perusahaan (SIZE).

Komposisi Aktiva Perusahaan (KAP), laba bersih pada suatu perusahaan dapat diperlakukan menjadi dua, yaitu melakukan investasi kembali kedalam aset yang produktif untuk melunasi kewajiban sebagai dividen. Dividen adalah sebagai bagian dari laba/earning/income yang dibagi. Perusahaan-perusahaan yang memiliki aktiva yang tak terwujud dan perusahaan-perusahaan yang memiliki aktiva lancar yang besar cenderung menerapkan Good Corporate Governance yang lebih ketat. Memperketat pada Good Corporate Governanve di karenakan pada aktiva tak terwujud dan aktiva lancar lebih mudah dipengaruhi dibandingkan aktiva tetap. Pada aktiva berwujud mudah untuk dimonitor dan tidak mudah untuk dicuri, dengan demikian akan menghasilkan hasil yang negatif pada Good Corporate Governance (Klepper dan Love, 2002). Menurut Maretha dan Anna (2013) bahwa

hubungan tersebut sangatlah penting untuk di perhatikan pada saat mengestimasi hubungan Good Corporate Governance dengan kinerja karena proporsi aset tidak berwujud dan aset tetap dapat menyebabkan kinerja operasionalnya lebih tinggi, sehingga semakin tinggi komposisi aset perusahaan maka kinerja perusahaan juga akan semakin tinggi.

Kesempatan Tumbuh (Growth Opportunity), pada kesempatan tumbuh tinggi bagi para perusahaan-perusahaan pasti membutuhkan dana bukan hanya dari dalam perusahaan (internal) tetapi juga membutuhkan dana dari luar perusahaan (eksternal). Dana yang diperoleh dari eksternal digunakan dan dilakukan untuk ekspansi. Guna melakukan ekspansi untuk mendorong memperbaiki dalam penerapan Corporate Governance serta kegunaannya agar biaya modal perusahaan mengalami penurunan (Melvina dan Mitha, 2012). Hasil penelitian dari Kusumawarnadi (2012) juga menjelaskan mengenai kesempatan tumbuh bagi perusahaan, dimana perusahaan-perusahaan yang dapat dan memiliki kesempatan tumbuh atau berinteraksi akan lebih profitabel, dan akan mempengaruhi kinerja didalam suatu perusahaan. (Rossi dan Rosinta, 2012). Kesempatan tumbuh juga dapat di ukur dengan menggunakan rata-rata penjualan untuk menghitung beberapa waktu (tahun). (Fauziah dan Hidayatur, 2012).

Ukuran Perusahaan (SIZE), adalah salah satu ukuran indikator yang di gunakan oleh investor, investor menggunakan pengukuran perusahaan untuk dapat menilai aset perusahaan dan kinerja perusahaan. Jika suatu perusahaan memiliki total aktiva dan total penjualan yang lebih besar maka perusahaan tersebut pada tahap pendewasaan (maturity). Perusahaan yang lebih berukuran besar dan dapat di percaya oleh investor, maka akan membuat investor menjaga investasinya di perusahaan tersebut. Selain itu, perusahaan yang besar juga akan mudah untuk masuk kedalam pasar modal, dengan kemudahan ini maka perusahaan akan mendapat dana yang lebih besar lagi. Dengan kemudahan dalam mendapatkan dana, maka perusahaan juga akan mendapatkan laba. Pemberian laba akan mengurangi pendanaan dari

internal dan akan mendapatkan dana dari sumber eksternal pasar modal, sehingga laba perusahaan akan meningkat. Sehingga, kelebihan dari ukuran perusahaan (SIZE) adalah sebagai salah satu indikator yang di gunakan investor dalam menilai aset ataupun dalam menilai suatu kinerja perusahaan.

2.2 Perusahaan Manufaktur

Negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia, perkembangan di negara Indonesia membuat perusahaan-perusahaan mulai menetap di negara ini. Salah satu perusahaan yang semakin marak dinegara Indonesia adalah perusahaan yang beroperasi dalam bidang manufaktur. Kata manufaktur atau perusahaan manufaktur sudah bukanlah hal yang asing di telinga masyarakat. Perusahaan manufaktur adalah suatu perusahaan yang melakukan pengelolaan semua bahan mentah yang di butuhkan didalam sebuah industri. Untuk penjelasan mengenai pengertian industri menurut Randy dan Juniati (2013) yang menyatakan bahwa industri yaitu menyangkut semua kegiatan manusia dalam bidang ekonomi yang sifatnya produktif dan komersial. Semakin maju dalam tingkat perkembangan disuatu Negara termasuk perkembangan perindustrian maka akan semakin meningkat jumlah macam industri serta akan semakin kompleks sifat kegiatan dan usaha tersebut.

Tahap dalam pengelompokan atau menggolongkan macam-macam industripun berbeda-beda. Dimana dalam mengelompokan berbagai macam industri memiliki beberapa kriteria, yaitu berdasarkan bahan baku, tenaga kerja, pangsa pasar, modal, atau teknologi yang di gunakan (Randy dan Juniati, 2013).

Industri yang digunakan didalam penelitian ini adalah semua industri manufaktur yang telah di keluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

2.3 Pengukuran Corporate Governance Perception Index

Corporate Governance Perception Index atau yang sering di sebut CGPI adalah indikator sebagai peringkat dari Good Corporate Governance. Corporate Governance

Perception Index (CGPI) lebih sering digunakan untuk peringkat dari penerapan Good Corporate Governance yang baik di Indonesia pada perusahaan publik yang dikembangkan oleh The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) (Situmorang dan Sudana, 2015). Sejak tahun 2001 The Indonesia Institute Corporate Governance (IICG) telah melakukan penelitian tentang proses penerapan Good Corporate Governance di perusahaan publik. Dari penelitian Situmorang dkk (2015) menjelaskan bahwa terdapat tujuh kriteria yang digunakan dalam penilaian penerapan Corporate Governance, yaitu komitmen perseroan pada Corporate Governance, pelaksanaan RUPS dan pelaksanaan minority shareholder, dewan komisaris, struktur direksi, hubungan dengan stakeholder, transparansi dan akuntabilitas, tanggapan terhadap riset IICG.

Nilai Corporate Governance Perception Index (CGPI) dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai akhir dari setiap tahapan. Tahadap dari CGPI seperti self-assement tentang penerapan konsep Corporate Governance, pengumpulan dokumen perusahaan, penyusunan makalah dan presentasi dan observasi perusahaan. Kemudian, hasil dari riset tersebut dapat dilihat dari pemeringkatan 10 besar perusahaan yang telah menerapkan Good Corporate Governance. Pengukuran Corporate Governance tersebut yang berisikan skor berupa angka mulai dari 0 sampai 100 yang merupakan hasil survey mengenai penerapan Good Corporate Governance pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, CGPI dapat mengukur kualitas aktual dari penerapan Good Corporate Governance dan aktivitas yang berhubungan secara relatif dengan Corporate Governance. Hal tersebut dapat membantu tercapainya kinerja perusahaan yang semakin meningkat. Kinerja perusahaan yang semakin meningkat akan dilihat atau dipandang oleh para investor, dengan keuntungan seperti ini membuat perusahaan untung karena akan meningkat harga pasar saham dan nilai perusahaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan Good Corporate Governance terhadap kinerja perusahaan yang didalamnya meliputi kinerja keuangan operasional dan kinerja pasar. Variabel independen didalam penelitian ini adalah Corporate Governance menurut The Indonesia Institute Corporate Governance (IICG) pada tahun 2012-2017.

2.4 Kajian Terdahulu

Mengamati, menganalisis, dan meneliti mengenai Good Corporate Governance sudah banyak sekali para peneliti yang meneliti mengenai sistem dari penerapan Good Corporate Governance. Tidak hanya meneliti sistem Good Corporate Governance saja, tetapi, para peneliti juga meneliti antar penerapan Good Corporate Governance dengan kinerja perusahaan. Dimana didalam kinerja perusahaan meliputi kinerja operasional perusahaan, seperti kinerja keuangan perusahaan serta kinerja pasar yang menjadi hubungan dengan Good Corporate Governance. Banyak dari para peneliti yang menyatakan bahwa hubungan dari keduanya adalah positif, seperti yang di kemukakan oleh Fauziah dan Hidayah (2012) dari penelitiannya yang menjelaskan Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap Return On Equity (ROE) dan juga menyatakan Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap Tobin's Q. dari hasil penelitian tersebut juga menyatakan bahwa perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang baik membuat kinerja perusahaan terlihat baik pula.

Hasil penelitian dari Maretha dan Anna (2013) yang menunjukkan bahwa Good Corporate Governance yang efektif secara jangka panjang dapat meningkatkan nilai perusahaan dan menguntungkan bagi para pemegang saham. Maka hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah bahwa Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Situmorang dkk (2015) didalam penelitiannya ia meneliti mengenai hubungan antara Good Corporate Governance dengan kinerja perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2005-2013. hasil yang di dapat Corporate Governance diprosikkan Corporate Governance Perception Index (CGPI) berpengaruh positif terhadap kinerja akuntansi dan pasar perusahaan BUMN. Hasil yang hampir samapun diungkapkan oleh Sayidah (2007) dari penelitiannya yang menyatakan adanya pengaruh skor Corporate Governance Perception Index (CGPI) terhadap kinerja perusahaan. Didalam penelitiannya pun mengungkapkan bahwa Corporate Governance secara statistik memiliki pengaruh signifikan dalam mempengaruhi kinerja operasional perusahaan yang di ukur dengan menggunakan Return On Equity (ROE). Tetapi, pada kinerja pasar perusahaan belum mempengaruhi jika menggunakan sistem penerapan Corporate Governance dengan menggunakan pengukuran Tobin's Q.

Berbeda halnya dengan hasil penelitian dari Hidayatur (2011), hasil yang diperoleh dari penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruhn Good Corporate Governance tidak signifikan terhadap ROE dan Tobin's Q. hal ini terjadi karena dalam penerapan Good Corporate Governance masih belum bisa menggambarkan kinerja perusahaan yang baik.

Tidak hanya ada di negara Indonesia yang banyak melahirkan penelitian mengenai Good Corporate Governance. Di negara lain seperti Itali juga banyak para peneliti yang meneliti perusahaan-perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Seorang peneliti dari Italia yaitu Rossi, Marco, dan Arturo (2015) juga meneliti untuk negara nya mengenai tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan yang terdaftar di perusahaan Itali, hasil penelitian empiris. Sama halnya dengan negara Indonesia yang menggunakan CGPI sebagai indikator peringkat Good Corporate Governance, tetapi untuk di negara Itali indikator peringkat perusahaan disebut Corporate Governance Quality Index (CGQI). CGQI adalah untuk menyiptakan kualitas index pada suatu tata kelola

perusahaan, yang mencoba untuk memahami apakah tata kelola perusahaan yang baik dapat mengarah hasil bisnis yang baik. 215 perusahaan yang di ambil dari seorang peneliti asal Itali yaitu Rossi dkk (2015) menghasilkan hasil negatif dan signifikan antara Tobins'Q dengan tata kelola perusahaan. Hasil tersebut dikarenakan sebagian perusahaan yang ada di Negara tersebut seorang manajer lebih memetingkan kepentingan mereka sendiri dari pada kepentingan pemegang saham. Kemudian hasil dari Return On Equity (ROE) menghasilkan hasil yang signifikan dari penelitian tersebut.

Buallay, Allam, dan Qasim (2017) adalah seorang peneliti yang meneliti kinerja perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang baik di negaranya sendiri, Buallay dkk (2017) adalah seorang peneliti dari negara Arab Saudi. Penelitian ini sama halnya dengan penelitian yang lain, yaitu memiliki tujuan untuk mengetahui dampak tata kelola perusahaan terhadap kinerja suatu perusahaan yang terdaftar di bursa saudi (TADAUWL) tahun 2012 sampai 2014 dengan mengambil data 171 perusahaan. Variabel dependen yang di gunakan didalam penelitian tersebut adalah ROA, ROE, dan Tobins'Q serta adanya variabel pendukung atau variabel kontrol yang sesuai dengan standar Arab Saudi. Hasil yang di dapat dari penelitian tersebut adalah tidak adanya dampak signifikan untuk tata kelola perusahaan pada kinerja operasional dan kinerja keuangan perusahaan perusahaan Arab Saudi.

2.5 Formulasi Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan

Memahami definisi kinerja perusahaan menurut Muh Arief Effendy (2000) yang ditulis didalam bukunya bahwa kinerja perusahaan dalam menerapkan Good Corporate Governance ditentukan dari keseriusannya dalam penerapan Good Corporate Governance. Menurut Muh Arief Effendy (2000) mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terdaftar didalam skor peringkat Corporate Governance yang di lakukan oleh IICG telah menerapkan Good Corporate Governance dengan baik dan secara langsung menaikkan nilai

sahamnya. Semakin tinggi penerapan Corporate Governance yang diukur dengan Corporate Indeks Perception semakin tinggi pula tingkat ketaatan perusahaan dan menghasilkan kinerja perusahaan yang baik.

Menurut Rofina dan Maswar (2013) yang menjelaskan bahwa secara teoritis praktik Good Corporate Governance dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dengan menghasilkan hasil penerapan dari Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap ROI, NPV, termasuk berpengaruh pada ROE. Pada kinerja keuangan perusahaan salah satu alat menganalisis dengan menggunakan Return On Equity (ROE), dan pada penelitian Rofiana dan Maswar (2013) yang menunjukkan hasil adanya hubungan (positif) antara Good Corporate Governance dengan Return On Equity (ROE), kondisi tersebut menunjukkan semakin tinggi nilai skor dalam penerapan Good Corporate Governance kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal yang dimilikinya juga akan semakin meningkat. Sama halnya dengan Ramadayu (2015) yang memberikan bukti bahwa adanya hubungan dari penerapan sistem Good Corporate Governance dengan kinerja perusahaan yang diutamakan kinerja keuangannya. Penelitian mendefinisikan Good Corporate Governance adalah jalan untuk menuju kesuksesan bagi suatu perusahaan. Dengan penerapan sistem ini dapat membantu perusahaan untuk melihat sejauh mana perusahaan berhasil dalam mengelola modal yang dimiliki. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan terdapat pengaruh dari penerapan Good Corporate Governance terhadap kinerja perusahaan (ROE) yang didalamnya memiliki variabel kontrol berupa komposisi kinerja perusahaan dan ukuran perusahaan. Kemudian, penelitian dari Ferdiana (2012) juga menghasilkan hasil bahwa Good Corporate Governance berpengaruh terdapat rasio Profitabilitas, dimana rasio profitabilitas yang di teliti salah satunya adalah menggunakan Return On Equity.

Hasil dari ketiga penelitian tersebut dapat diambil kesimpulannya bahwa Corporate Governance mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang dihitung dengan

menggunakan model Return On Equity (ROE). Berdasarkan kajian dan temuan empiris tersebut yang memiliki kaitannya dengan penelitian ini penulis mengajukan hipotesis:

H_1 : Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.5.2 Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Pasar

Menurut Nuswandari (2009) menyatakan bahwa Corporate Governance merupakan faktor penting dalam menjelaskan nilai pasar perusahaan. Tetapi didalam penelitiannya, Nuswandari (2009) menyatakan bahwa Corporate Governance Perception Index (CGPI) tidak berpengaruh terhadap kinerja pasar perusahaan, tidak satupun dari variabel kontrol yang secara statistik mempengaruhi kinerja pasar ataupun dikatakan bahwa Good Corporate Governance tidak mendukung kinerja pasar. Kemudian, hasil dari penelitian Fauziah dan Hidayatur (2012) juga memiliki hasil yang sama dengan penelitian Nuswandari (2009) yang menyatakan bahwa Good Corporate tidak memiliki hubungan atau tidak memiliki pengaruh pada kinerja perusahaan termasuk kinerja pasar. Hasil yang didapat adalah Good Corporate Governance tidak berpengaruh secara signifikan baik terhadap kinerja operasionalnya ataupun dari kinerja pasar perusahaan yang di ukur dengan menggunakan Tobin's Q. tidak berpengaruhnya Good Corporate Governanve menurut penelitian tersebut dikarenakan oleh rendahnya kesadaran dalam penerapan Good Corporate Governance, belum tertariknya manajemen perusahaan dalam penerapan Good Corporate Governance untuk perusahaannya, dan perusahaan beranggapan bahwa menggunakan Good Corporate Governance maka perusahaan harus mengikuti prinsip transparansi (terbuka), tetapi perusahaan tersebut beranggapan bahwa jika perusahaan melakukan prinsip transparansi (terbuka) akan membuat perusahaan terancam kerahasiaannya.

Berdasarkan kajian dan temuan empiris tersebut yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, maka penulis mengajukan hipotesis:

H₂ : Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap kinerja pasar perusahaan.

